Journal of Election and Leadership (JOELS)
ISSN 2723-5149

©LPPM, Universitas Lancang Kuning

Analysis of the Shifting Political Networks of Irman Gusman and Emma Yohana in the DPD Revote

Analisis Pergeseran Jaringan Politik Irman Gusman dan Emma Yohana pada Pemungutan Suara Ulang DPD

Yuza Rahma Tullah[1]*, Asrinaldi[2], Doni Hendrik[3]
[1,2,3] Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia
*Correspondence Author: yuza.rahmatullah30@gmail.com

Abstract
The 2024 Revote (PSU) for the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia in West Sumatra presented unique electoral dynamics. This was triggered by a Constitutional Court decision that reinstated Irman Gusman into the contest, thereby shifting the position of incumbent Emma Yohana. This study aims to analyze the shift in political network support between Irman Gusman and Emma Yohana during the 2024 DPD revote in West Sumatra. The research employs a qualitative approach with a comparative case study type, combining Barnes's social network typology and David Knoke's (1994) seven indicators of political networks: centrality, prestige, network cohesion, structural equivalence, power-dependency relations, exchange relations, and network density. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies, validated by triangulation. The results show that at the social network level, reconfiguration shifted from emotional and interest-based networks that previously supported Emma Yohana toward power networks deliberately managed through the nodes of Muhammadiyah, Bundo Kanduang, and community leaders to support Irman Gusman. At the political network level, this shift is reflected in simultaneous changes across Knoke's seven indicators—centrality, prestige, cohesion, structural equivalence, power-dependency relations, exchange relations, and network density—which together signify the transfer of dominance and power relations from Emma Yohana to Irman Gusman. Thus, Barnes's typology explains the types of networks at play, while Knoke's indicators illustrate how these networks change, suggesting that the electoral shift in the revote was driven not merely by voter preference, but by the actors' ability to reorganize political networks and consolidate new dependency nodes amid a public trust crisis in electoral integrity.
***Keywords**: Political Network Shift; Revote; Regional Representative Council; West Sumatra*

Abstrak
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Sumatera Barat tahun 2024 menghadirkan dinamika elektoral unik. Hal ini diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan Irman Gusman ke dalam kontestasi sehingga menggeser posisi petahana Emma Yohana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran dukungan jaringan politik antara Irman Gusman dan Emma Yohana pada PSU DPD Sumatera Barat tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus komparatif, memadukan tipologi jaringan sosial Barnes dan tujuh indikator jaringan politik David Knoke (1994): sentralitas, prestise, kohesi jaringan, kesetaraan struktural, relasi kekuasaan-ketergantungan, relasi pertukaran, dan kepadatan jaringan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang divalidasi dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level jaringan sosial, rekonfigurasi bergerak dari jaringan emosi dan kepentingan yang sebelumnya menopang Emma Yohana menuju jaringan kekuasaan yang dikendalikan secara sengaja melalui simpul Muhammadiyah, Bundo Kanduang, dan tokoh masyarakat untuk mendukung Irman Gusman. Pada level jaringan politik, pergeseran ini tercermin dari perubahan simultan pada ketujuh indikator Knoke sentralitas, prestise, kohesi, kesetaraan struktural, relasi kekuasaan-ketergantungan, relasi pertukaran, dan kepadatan jaringan yang bersama-sama menandai berpindahnya pusat dominasi dan pola relasi kekuasaan dari Emma Yohana kepada Irman Gusman. Dengan demikian, tipologi Barnes menjelaskan jenis jaringan yang beroperasi, sedangkan indikator Knoke menjelaskan bagaimana jaringan tersebut berubah, sehingga pergeseran hasil elektoral PSU tidak semata-mata didorong oleh preferensi pemilih, melainkan

Received (2026-07-23); Accepted (2026-08-18); Published (2026-08-20)

oleh kemampuan aktor menata ulang jaringan politik dan mengonsolidasikan simpul ketergantungan baru di tengah krisis kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.
Kata Kunci: Pergeseran Jaringan Politik; Pemungutan Suara Ulang; Dewan Perwakilan Daerah; Sumatera Barat

1. Pendahuluan

Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala merupakan salah satu fondasi (Yandra, 2024 dan 2025) dan ciri utama negara demokrasi, termasuk Indonesia (Hasibuan 2023). Namun demikian, integritas proses elektoral tidak selalu berjalan mulus, sebagaimana ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Putusan tersebut mengembalikan nama Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap setelah sebelumnya tidak diikutsertakan pada pemilihan legislatif serentak Februari 2024, sehingga menghadirkan konfigurasi kontestasi yang berbeda dari pemilihan sebelumnya.

Hasil rekapitulasi menunjukkan dinamika yang mencolok: pada Pileg Februari 2024, Emma Yohana meraih 377.605 suara atau peringkat kedua setelah Cerint Irraloza Tasya, sementara pada PSU Juli 2024 perolehan suaranya turun tajam menjadi 122.547 suara atau sekitar 67 persen penurunan, sehingga ia gagal mempertahankan kursinya. Sebaliknya, Irman Gusman yang baru mengikuti kontestasi pada PSU berhasil meraih 176.987 suara dan terpilih sebagai anggota DPD. Perubahan drastis ini menunjukkan bahwa hasil elektoral PSU tidak semata-mata mencerminkan pergeseran preferensi individual pemilih, tetapi juga mengindikasikan adanya pergeseran jaringan politik yang menopang kedua kandidat tersebut.

Hal ini juga dapat dilihat dari pergeseran dukungan organisasi-organisasi kunci. Meski sama-sama kader Muhammadiyah, hanya Irman yang mendapat rekomendasi resmi organisasi (surat PWM No. 215/REK/II.0/D/2023) berkat kedekatan historis keluarganya, ditambah dukungan dari Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau (PBKM) dan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) yang sebelumnya dekat dengan Emma, justru beralih kepadanya, kecuali Gebu Minang yang tetap konsisten mendukung Emma.

Merujuk pada tipologi Barnes, jaringan kekuasaan (bukan jaringan kepentingan atau emosi) terbukti paling menentukan karena mampu mengalihkan arus dukungan melalui instruksi formal organisasi. Dalam kerangka David Knoke (1990), fenomena ini paling tepat dijelaskan melalui indikator relasi kekuasaan-ketergantungan *(power dependence relations)* yang diikuti oleh pergeseran sentralitas, yaitu ketika organisasi kunci mengalihkan dukungan formalnya, tercipta pusat ketergantungan baru yang mengubah posisi strategis kedua kandidat dalam jaringan. Inilah yang melandasi rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana pergeseran jaringan politik antara Irman Gusman dan Emma Yohana terjadi pada PSU tersebut.

Kajian terdahulu mengenai jaringan politik dalam pemilu masih menyisakan sejumlah celah. (Aspinall, Hicken, 2020) Menjelaskan jaringan klientelistik non-partai melalui istilah "guns for hire", namun kurang menjangkau konteks relasional berbasis keagamaan dan kekerabatan yang lazim di Indonesia. (Javarone 2016) serta (Halu et al. n.d.) menekankan pentingnya ekspansi dan konektivitas jaringan melalui pendekatan simulasi komputasional, tetapi belum menangkap kompleksitas kontestasi non-partai seperti pemilihan DPD yang mengandalkan tokoh perseorangan tanpa

mesin partai formal. Penelitian mengenai PSU sendiri, misalnya (Prayogi A, 2025), (Handayani 2020) dan (Pinatih 2024) lebih berfokus pada aspek administratif dan sebab-akibat prosedural PSU, belum menyentuh dimensi pergeseran jaringan aktor politik pascaputusan. Kekosongan inilah yang mendasari perlunya penelitian yang menganalisis pergeseran jaringan politik pada kasus PSU DPD sebagai kontestasi non-partai yang unik.

Sejumlah penelitian terdahulu juga telah menyinggung dinamika jaringan politik pada PSU DPD Sumatera Barat 2024 secara langsung, namun dengan fokus yang berbeda. (Khoiri 2025) misalnya telah membedah peran Muhammadiyah dalam jaringan Irman Gusman pada PSU ini, tetapi analisisnya terbatas pada satu organisasi saja tanpa mempertimbangkan simpul jaringan lain seperti Bundo Kanduang, PGRI, maupun jaringan kekerabatan personal yang turut menopang kemenangannya. Penelitian ini berbeda karena tidak memotret jaringan politik pada satu titik waktu maupun satu organisasi semata, melainkan melacak pergeseran jaringan secara komparatif antara dua kandidat sekaligus lintas ketujuh indikator Knoke, sehingga dapat menangkap bagaimana aktor politik menata ulang relasi kekuasaan, kepentingan, dan emosional mereka ketika peta dukungan konvensional terguncang oleh interupsi hukum seperti PSU.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pergeseran dukungan jaringan politik antara Irman Gusman dan Emma Yohana pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran dukungan jaringan politik kedua kandidat dalam situasi kontestasi elektoral yang diwarnai delegitimasi prosedural. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka analisis jaringan politik David Knoke secara komparatif pada kasus PSU di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi kajian kontestasi non-partai pada level DPD yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan pemilu legislatif berbasis partai.

2. Perspektif Teori

Kajian ini bertumpu pada dua kerangka teoritis yang saling melengkapi, yaitu tipologi jaringan sosial Barnes dan model analisis jaringan politik David Knoke (1994). Wasserman dan Faust (1994) mendefinisikan jaringan sosial sebagai struktur yang terdiri atas aktor dan ikatan relasional yang terdefinisi di antara aktor-aktor tersebut, sedangkan Van Dijk (2006) memandangnya sebagai sistem sosial dengan ikatan konkret dan dalam hubungan yang abstrak.

2.1 Jaringan Sosial dan Tipologi Barnes

Barnes membedakan jaringan sosial ke dalam tiga tipe, yaitu jaringan kepentingan (interest) yang terbentuk atas tujuan instrumental dan cenderung temporer, jaringan kekuasaan (power) yang dibentuk melalui pengendalian dan konfigurasi relasi yang sengaja diatur, serta jaringan emosi (sentiment) yang berlandaskan kedekatan personal dan cenderung stabil dalam jangka panjang (Agusyanto, 2007). Dalam konteks PSU DPD Sumatera Barat, jaringan kepentingan tampak pada mobilisasi dukungan politik dan akses sumber daya kampanye, jaringan kekuasaan terlihat pada pengendalian struktur dukungan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sementara jaringan emosi tecermin dari kedekatan personal-kekerabatan yang menjadi basis loyalitas jangka panjang.

Konsep jaringan sosial ini diperkuat oleh (Stanley Wasserman and Katherine Faust 1994) yang merumuskan delapan elemen dasar analisis jaringan, meliputi ikatan relasional (relational ties) antaraktor, dyad sebagai ikatan dua aktor, triad sebagai relasi tiga aktor, subkelompok (subgroup),

kelompok (group), relasi (relation), dan jaringan sosial itu sendiri sebagai seperangkat aktor beserta relasi yang mengikat mereka. Sementara itu, (Van Dijk 2006) menegaskan bahwa jaringan sosial merupakan sistem sosial dengan ikatan konkret dalam hubungan yang bersifat abstrak, sehingga aktor *(nodes)* tidak sekadar terhubung secara fisik, melainkan juga melalui makna dan kepentingan bersama yang mengikat interaksi mereka. Kombinasi elemen-elemen ini memperkuat basis konseptual untuk memetakan bagaimana jaringan kepentingan, kekuasaan, dan emosi pada kasus Irman Gusman dan Emma Yohana terbentuk dari ikatan-ikatan konkret antaraktor, mulai dari relasi dyadic personal-kekerabatan hingga relasi kelompok yang melibatkan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan berskala besar.

2.2 Jaringan Politik dan Model David Knoke

(Knoke 1990) mendefinisikan jaringan politik sebagai struktur hubungan antar-aktor politik yang menciptakan pola-pola yang memengaruhi kekuasaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Kekuasaan dalam perspektif ini bukan atribut yang melekat pada individu, melainkan produk posisi relasional dalam jaringan, sehingga perubahan pola hubungan akan menghasilkan perubahan distribusi kekuasaan. Knoke merumuskan tujuh indikator untuk menjelaskan penataan ulang jaringan politik: (1) sentralitas, yakni posisi strategis aktor yang tercermin dari jumlah koneksi dan kecepatan akses terhadap arus informasi, (2) prestise atau in-degree prominence, yaitu derajat rujukan yang diterima seorang aktor dari aktor lain. (3) kohesi jaringan, yang menggambarkan solidaritas internal kelompok; (4) kesetaraan struktural, yaitu kesamaan pola relasi antaraktor meski tidak saling terhubung langsung. (5) relasi kekuasaan - ketergantungan, yang merujuk pada teori power-dependence, (6) relasi pertukaran, serta (7) kepadatan jaringan, yakni proporsi ikatan aktual terhadap seluruh ikatan yang mungkin terbentuk. Ketujuh indikator ini digunakan secara terpadu sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dilengkapi dengan konsep structural holes (Burt, 1992), teori switching power (Castells, 2009), dan temuan Aspinall (2014) mengenai predation dan defection dalam jaringan broker politik.

Titik temu antara kedua kerangka teoritis ini terletak pada hubungan antara struktur dan dinamika jaringan. Tipologi Barnes menjelaskan jenis jaringan sosial yang beroperasi jaringan kepentingan, kekuasaan, atau emosi sedangkan ketujuh indikator Knoke menjelaskan bagaimana jaringan tersebut berubah, beradaptasi, dan direstrukturisasi ketika kontestasi elektoral berlangsung. Celah teoritis yang coba dijembatani penelitian ini adalah bahwa kajian jaringan politik non-partai seperti DPD selama ini jarang memadukan kedua kerangka secara terpadu: penelitian jaringan sosial cenderung berhenti pada pemetaan jenis relasi, sementara penelitian jaringan politik cenderung mengabaikan basis sosial-keagamaan yang menjadi fondasi relasi tersebut. Dengan mengintegrasikan tipologi Barnes sebagai peta jenis jaringan dan tujuh indikator Knoke sebagai alat ukur perubahan struktural, penelitian ini berupaya mengungkap secara lebih mendalam proses pergeseran jaringan politik, baik dalam bentuk pergeseran aktor kunci, perubahan pola relasi, maupun perubahan distribusi kekuasaan yang terjadi pada PSU DPD di Sumatera Barat tahun 2024.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus komparatif (Yin, 2011), yang bertujuan membandingkan pengaturan jaringan politik antara dua kandidat, Irman Gusman dan Emma Yohana, yang bersaing pada PSU DPD di Sumatera Barat tahun 2024. Lokasi penelitian

ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat karena minimnya kajian mengenai dinamika demokrasi lokal pada peristiwa PSU serta munculnya pergeseran preferensi pemilih yang signifikan pada peristiwa tersebut.

Unit analisis penelitian ini adalah kelompok jaringan Irman Gusman dan Emma Yohana beserta pihak-pihak yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam jaringan tersebut, dengan pembatasan pada pergeseran hubungan langsung (direct ties) di lingkaran internal utama (Ring 1) kedua kandidat. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebanyak sepuluh orang, terdiri atas kedua kandidat, ketua tim pemenangan, tokoh organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (Muhammadiyah, PBKM), akademisi, serta pakar politik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, yang selanjutnya divalidasi dengan teknik triangulasi sumber (Ningsih, 2024). Analisis data mengikuti model interaktif Sugiyono (2013), meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang hingga diperoleh temuan yang kredibel. Penyajian data memadukan interpretasi emik, yakni sudut pandang aktor politik lokal, dengan interpretasi etik, yaitu penempatan temuan tersebut dalam kerangka konseptual ilmu politik yang objektif.

4. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan hasil pemilihan sebelum dan sesudah PSU memperlihatkan pergeseran dukungan yang tajam pada sejumlah kandidat, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Pileg Februari 2024 dan PSU Juli 2024

No.	Nama Kandidat	Suara Pileg (Feb 2024)	Suara PSU (Jul 2024)
1	Cerint Irraloza Tasya	489.942	283.020
2	Emma Yohana	377.605	122.547
3	H. Jelita Donal	308.986	187.765
4	H. Muslim M. Yatim	275.203	199.919
5	Nurkhalis	224.195	144.339
6	Irman Gusman	-	176.987

Sumber: KPU.go.id (diolah kembali oleh peneliti, 2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Emma Yohana mengalami penurunan suara sekitar 67 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kandidat petahana lain seperti Cerint (42%), Jelita Donal (39%), atau Muslim M. Yatim (27%), sementara Irman Gusman yang baru mengikuti kontestasi pada PSU justru meraih 176.987 suara dan terpilih.

Perbandingan total suara sah pada kedua momentum pemilihan turut memperlihatkan penurunan partisipasi elektoral yang tajam: total suara sah pada Pileg Februari 2024 tercatat sebesar 2.865.393 suara, sementara pada PSU Juli 2024 hanya sebesar 1.439.145 suara, atau turun sekitar 49,8 persen. Temuan ini sejalan dengan pengakuan Irman Gusman sendiri bahwa tingkat partisipasi pemilih pada PSU hanya berkisar 35,71 persen, yang menegaskan bahwa keterhubungan jaringan yang kuat pada simpul-simpul inti tidak serta-merta berbanding lurus dengan partisipasi pada basis pemilih secara keseluruhan. Untuk membedah mekanisme di balik pergeseran ini, subbagian berikut menguraikan temuan pada masing-masing dari tujuh indikator jaringan politik Knoke (1990) secara berurutan, sebelum disintesiskan pada bagian penutup subbab ini.

Sentralitas

Sentralitas menunjukkan posisi strategis seorang aktor yang tercermin dari intensitas koneksi dan kecepatan aksesnya terhadap arus informasi (Freeman, 1978). Temuan menunjukkan bahwa sentralitas bersifat non-permanen dan dapat berada dalam "posisi dorman". Irman Gusman sendiri menjelaskan bahwa sebelum PSU, jaringannya tetap ada

namun tidak dapat dimobilisasi secara masif karena status pencalonannya belum pulih pascadiskualifikasi pada Pileg Februari 2024. Begitu putusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan namanya ke Daftar Calon Tetap, jaringan laten tersebut kembali aktif dalam waktu sangat singkat, ditopang oleh ketua tim kampanyenya yaitu Marhadi Effendi, yang menjelaskan bahwa jaringan lama dari Pasaman Barat dan Timur hingga Pesisir Selatan langsung digerakkan kembali melalui kantong-kantong basis Muhammadiyah. Sebaliknya, sentralitas Emma Yohana yang terbentuk dari status kepetahanan sejak 2009 justru mengalami penyusutan karena ia dinilai semakin pasif berinteraksi dengan simpul-simpul strategis menjelang PSU, sehingga arus informasi dan rujukan yang sebelumnya mengalir kepadanya beralih ke aktor lain yang dianggap lebih aktif.

Prestise atau Prominence (In-Degree Prominence)

Prestise merujuk pada in-degree prominence, yaitu derajat rujukan yang diarahkan aktor lain kepada seorang aktor tanpa harus dibalas dengan intensitas yang setara (Knoke & Burt, 1983). Prestise awal Emma Yohana dibangun dari status keterwakilan perempuan yang secara historis didukung oleh berbagai organisasi perempuan seperti Bundo Kanduang, IWAPI, IPI, dan MTI, sebagaimana dijelaskan ketua tim pemenangannya, Revi Marta Dasta. Namun demikian, dukungan tersebut tidak pernah dikonversi menjadi rujukan formal yang mengikat kelembagaan, sehingga rapuh ketika diuji. Wakil Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat bahkan mempertanyakan keaktifan Emma di organisasi tersebut, dengan menyebut bahwa "selama tiga periode dia pasif sekali di organisasi". Sebaliknya, prestise Irman Gusman dipupuk secara sengaja melalui strategi sosialisasi terbuka di kantong-kantong Muhammadiyah dan meluas hingga tingkat elit kelembagaan negara ia pernah dipercaya menjadi ketua DPD RI oleh sesama senator, yang menurut Ki Jal Atri Tanjung menunjukkan soliditas dukungan antarsesama anggota. Menariknya, Irman sendiri memosisikan dirinya bukan sebagai "pusat komando tunggal", melainkan sebagai "rujukan substantif" yang menjaga proporsionalitas pesan politik. Temuan lapangan turut mengungkap bahwa prestise di dalam satu organisasi pendukung sekalipun bersifat berjenjang: Wakil Pimpinan Muhammadiyah mengungkapkan bahwa dari tiga kandidat yang sama-sama menerima surat rekomendasi, hanya dua Irman Gusman dan Jelita Donal yang benar-benar mendapat pendampingan aktif di lapangan, sehingga prominence tidak dapat diukur semata dari keberadaan dokumen formal, melainkan dari intensitas pendampingan aktual, sejalan dengan catatan Aspinall dan Hicken (2020) bahwa legitimasi politik dalam sistem proporsional terbuka bersifat cair bahkan di internal satu organisasi yang sama.

Kohesi Jaringan

Kohesi menggambarkan tingkat keterhubungan dan kekuatan relasi internal suatu kelompok (Knoke, 1994; Coleman, 1988). Temuan menunjukkan fenomena "kohesi terkelola" (managed cohesion) di internal Muhammadiyah: meski organisasi ini merekomendasikan tiga kandidat sekaligus, elitnya secara sengaja melakukan segmentasi wilayah kerjam"ketika PSU dorongan kuat ke Pak Irman bisa saja tergerus habis tuh Pak Jel... makanya kepiawaian kita mengatur di mana yang harus Irman, di mana yang harus Pak Jel," sebagaimana diungkapkan Wakil Pimpinan Muhammadiyah agar kompetisi internal tidak saling menggerus, melainkan diarahkan menggerus suara kandidat luar seperti Emma Yohana. Kohesi yang tampak solid ini juga merupakan hasil dari kohesi tersaring *(filtered cohesion)*, koordinator lapangan tim

Irman Gusman mengakui bahwa simpul internal yang menunjukkan sikap tidak sejalan sengaja tidak dipaksa melainkan diredam secara persuasif agar gesekan tidak menjalar. Sebaliknya, dukungan organisasi perempuan terhadap Emma Yohana, menurut Revi Marta Dasta, secara emosional kuat namun "tidak pernah terikat secara formal tertulis", menyerupai jaringan terbuka *(open network)* yang rentan kehilangan daya ikat kolektif ketika partisipasi menurun terbukti dari perolehan Emma yang melorot dari peringkat empat besar menjadi peringkat keenam. Pola ini konsisten dengan konsep simmelian ties (Krackhardt, 1999): struktur berjenjang Muhammadiyah (PWM-PDM-Cabang-Ranting) menghasilkan tekanan kecocokan kolektif yang jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan ikatan dyadic yang terpisah-pisah pada jaringan Emma Yohana.

Kesetaraan Struktural

Dua aktor dapat dianggap setara secara struktural apabila memiliki pola relasi yang serupa terhadap aktor lain, walau tidak selalu terhubung langsung (Lorrain & White, 1971; Knoke, 1994). Temuan menunjukkan bahwa Irman Gusman dan Emma Yohana menempati posisi struktural yang nyaris identik: keduanya membina hubungan dengan kategori aktor yang sama, yaitu organisasi keagamaan modernis (Muhammadiyah), organisasi perempuan-adat (Bundo Kanduang), dan jejaring profesi (PGRI/IWAPI) cerminan dari tiga pilar sosial Minangkabau, yakni agama, adat, dan cadiak pandai. Kesetaraan struktural ini bahkan meluas hingga level kelembagaan negara: sebelum PSU, keduanya adalah sesama anggota DPD RI yang saling mendukung, sebagaimana diakui Ki Jal Atri Tanjung. Muhammadiyah sendiri secara sadar memosisikan diri sebagai broker structurally netral yang memberi jarak setara pada setiap kandidat direkomendasikan. Namun demikian, kesetaraan ini tidak berlaku seragam di seluruh wilayah geografis: pada kantong-kantong teritorial seperti Pariaman, wakil ketua tim pemenangan Muslim M. Yatim menegaskan bahwa Jelita Donal akan tetap menang di sana "nggak pakai Muhammadiyah pun", karena loyalitas personal-teritorial jauh lebih kuat daripada relasi keorganisasian apa pun. Sebaliknya, Emma Yohana yang tidak memiliki kantong pertahanan independen semacam itu bahkan di kampung halamannya sendiri, Pasaman Barat menjadi aktor yang paling sepenuhnya terpapar risiko substitusi struktural ketika Muhammadiyah dan PBKM mengalihkan dukungan mereka.

Relasi Kekuasaan dan Ketergantungan

Merujuk pada teori power-dependence Emerson (1962) yang diadaptasi Knoke (1994), kekuasaan seorang aktor berbanding lurus dengan derajat ketergantungan aktor lain kepadanya dan berbanding terbalik dengan ketersediaan alternatif relasi. Temuan menunjukkan relasi yang sangat asimetris yaitu organisasi seperti Muhammadiyah tidak pernah bergantung pada satu kandidat, sebagaimana ditegaskan Wakil Pimpinannya, "organisasi itu tergantung pada satu orang tidak mungkin", sementara kandidat justru berada pada posisi yang bergantung pada organisasi. Emma Yohana gagal mengelola posisi ketergantungan ini secara aktif karena berasumsi dukungan akan datang otomatis berkat status kadernya di masa lalu, tanpa terus mendatangi pimpinan Muhammadiyah di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota sebuah kegagalan yang oleh kerangka Emerson dijelaskan sebagai kesalahan memperlakukan kekuasaan relasional sebagai hak permanen. Sebaliknya, Irman Gusman secara aktif memelihara posisi ketergantungannya, sebagaimana dijelaskan koordinator lapangannya: "Muhammadiyah jaringannya, Irman personal-nya" Irman menyumbang sumber daya personal (transportasi, konsumsi, logistik) untuk menjaga keberlangsungan relasi. Ia juga melakukan operasi penyeimbang (balancing

operations) dengan mendiversifikasi ketergantungan ke tiga simpul independen sekaligus Muhammadiyah, PBKM, dan PGRI yang masing-masing memberi akses ke basis massa berbeda dan tidak tumpang tindih, berbeda dari jaringan Emma Yohana yang justru tumpang tindih menyasar basis perempuan perkotaan yang sama. Pergeseran paling mendasar dalam relasi ini bukan hanya arah dukungan, melainkan pergeseran sifat ketergantungan itu sendiri. Dari pengaturan informal-personal yang cukup memadai dalam siklus pemilu normal bertahun-tahun, menjadi hubungan formal-institusional yang dituntut oleh kondisi darurat PSU yang hanya berlangsung sebelas hari.

Relasi Pertukaran

Jaringan politik dibangun melalui relasi pertukaran sumber daya berupa dukungan, informasi, akses, atau legitimasi yang seringkali tidak simetris (Blau, 1967; Knoke, 1994). Meski secara resmi Muhammadiyah menyatakan tidak menerapkan politik uang, sebagaimana ditegaskan salah satu pengurusnya bahwa platform organisasi "tidak transaksional", temuan lapangan mengungkap adanya kewajiban timbal balik material yang signifikan mulai dari kompensasi alokasi posisi tenaga ahli bagi perwakilan organisasi, penanggungan biaya logistik kunjungan ke cabang, hingga tradisi kurban tahunan yang dagingnya dibagikan kepada kader organisasi. Dalam kerangka Blau, pola donasi berkala ini berfungsi sebagai "kewajiban timbal balik yang tidak ditentukan" yang menciptakan kredit sosial yang dapat dicairkan kapan pun dibutuhkan. Irman Gusman, yang relasi pertukarannya berakar pada ikatan kekerabatan ayahnya adalah tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang memiliki cadangan timbal balik yang jauh lebih besar dibandingkan kandidat lain seperti Muslim M. Yatim, yang justru membatasi diri dari saluran resmi Muhammadiyah karena menilai nilai tukarnya tidak sebanding dengan biaya politik yang harus ditanggung. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa nilai tukar dukungan organisasi tidak seragam secara geografis: di wilayah dengan loyalitas teritorial yang telah mengakar seperti basis Jelita Donal, dukungan organisasi hanya berfungsi sebagai "cap persetujuan simbolis" atas hasil yang sudah dapat diprediksi, sedangkan di wilayah yang lebih cair seperti Pasaman Barat basis Emma Yohana sendiri nilai tukar tersebut jauh lebih produktif dan menentukan arah pergeseran suara.

Kepadatan Jaringan

Kepadatan jaringan menunjukkan proporsi hubungan aktual terhadap seluruh hubungan yang mungkin terbentuk dalam suatu sistem (Knoke, 1994; Wasserman & Faust, 1994). Data lapangan menunjukkan bahwa struktur tim relawan Irman Gusman dibangun berjenjang hingga tingkat nagari, dengan rasio satu penggerak untuk setiap lima suara di setiap TPS pola yang justru semakin padat menuju akar rumput *(deep reach)* daripada terkonsentrasi di pusat, sehingga sangat efisien untuk mobilisasi cepat dalam masa kampanye PSU yang hanya sebelas hari. Sebaliknya, struktur tim Emma Yohana, menurut Revi Marta Dasta, hanya mengandalkan satu hingga dua penghubung per kabupaten/kota tanpa lapisan tambahan di tingkat kecamatan atau nagari pola jangkauan yang luas namun dangkal *(wide reach, low density),* sejalan dengan konsep kekuatan ikatan lemah dari Granovetter (1973). Perbedaan kepadatan struktural inilah yang menjelaskan mengapa jaringan Irman Gusman jauh lebih tangguh menghadapi tenggat waktu PSU yang sangat singkat dibandingkan jaringan Emma Yohana yang lebih longgar.

Sintesis Antarindikator

Analisis terhadap ketujuh indikator Knoke menunjukkan bahwa pergeseran jaringan politik pada PSU DPD Sumatera

Barat 2024 bukan peristiwa tunggal, melainkan hasil dari rantai sebab-akibat yang saling terkait. Titik awalnya adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan ketergantungan yang telah lama berlangsung antara kandidat dan organisasi keagamaan (4.5), yang memberi ruang bagi Irman Gusman untuk mendiversifikasi ketergantungan dan memperoleh legitimasi berlapis dari tiga simpul kelembagaan sekaligus, sebagaimana dibuktikan oleh surat rekomendasi resmi PWM Sumatera Barat Nomor 215/REK/II.0/D/2023. Legitimasi berlapis ini secara langsung meningkatkan prestise, yang menjadi prasyarat pergeseran sentralitas karena aktor yang paling sering dirujuk secara alami menjadi paling terhubung. Proses ini didukung oleh mekanisme relasi pertukaran yang aktif kesediaan memenuhi kewajiban timbal balik material maupun simbolis yang selanjutnya memperkuat kohesi jaringan karena kebutuhan timbal balik organisasi terpenuhi. Kohesi ini pada gilirannya memungkinkan konsolidasi kepadatan jaringan secara selektif dan efisien, sementara kesetaraan struktural berperan sebagai kondisi batas yang menjelaskan mengapa konsolidasi tersebut tidak berlangsung merata di seluruh wilayah fenomena yang selaras dengan konsep structural holes (Burt, 1992). Rantai kausal tujuh indikator inilah yang secara bersamaan menjelaskan mengapa Irman Gusman berhasil merebut kembali kursi DPD, sementara jaringan Emma Yohana mengalami dekomposisi struktural *(network decay)* yang lazim dibahas dalam studi kerentanan petahana, diperparah oleh predation dan defection broker politik (Aspinall, 2014) ketika peluang kemenangannya dinilai melemah. Temuan ini memperkuat proposisi utama Knoke (1994) bahwa kekuasaan dalam jaringan politik lebih berkaitan dengan posisi ketimbang kepribadian aktor, sekaligus memperkaya tipologi Barnes dengan menunjukkan bahwa batas antara jaringan emosional dan jaringan kekuasaan tidak bersifat kaku, melainkan dapat saling bertransformasi seiring perubahan pola hubungan personal dan kelembagaan di sekitar aktor.

5. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran hasil elektoral pada PSU DPD Sumatera Barat tahun 2024 merupakan produk dari adanya pergeseran jaringan politik yang beroperasi melalui tujuh mekanisme relasional Knoke secara simultan dan saling menguatkan, bukan sekadar akibat kejenuhan pemilih, dukungan Muhammadiyah semata, atau faktor kepribadian kandidat. Temuan ini memperluas literatur kontestasi nonpartai di Indonesia, khususnya pada level DPD, dengan membuktikan bahwa ruang elektoral tersebut merupakan medan pertarungan relasional yang sangat bergantung pada kemampuan aktor mengonversi struktur jejaring sosial-keagamaan yang telah mapan menjadi infrastruktur mobilisasi politik yang otonom.

Pergeseran poros kekuasaan dari jaringan petahana Emma Yohana menuju poros re-sentralisasi baru yang berpusat pada Irman Gusman terjadi bukan karena putusnya ikatan lama secara mendadak, melainkan melalui perubahan keseimbangan struktural dan dinamika ketergantungan kekuasaan yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh Irman Gusman. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah kajian misalnya pada Pilkada atau pemilu legislatif di daerah lain guna menguji apakah pola pergeseran jaringan organisasi keagamaan semacam ini merupakan gejala umum dalam politik Indonesia atau spesifik pada konteks pemungutan suara ulang.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing yaitu bapak Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si dan bapak Dr. Doni

Hendrik, S.IP., M.Soc., Sc dan Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, serta seluruh informan penelitian yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

7. Referensi

Agusyanto, R. (2007). *Jaringan sosial dalam organisasi.* Raja Grafindo Persada.

Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies, 46*(1), 1–23.

Aspinall, E., & Hicken, A. (2020). Guns for hire and enduring machines: Clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization, 27*(1), 137–156.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2014). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots.* NUS Press.

Blau, P. M. (1967). *Exchange and power in social life.* Wiley.

Burt, R. S. (1992). *Structural holes: The social structure of competition.* Harvard University Press.

Castells, M. (2009). *Communication power* (1st ed.). Oxford University Press.

Dwiastuti, M. (2025). Causes and implications of re-voting in the 2024 simultaneous elections in Trenggalek Regency. *Jurnal Suara Politik, 4*(1), 39–46.

Emerson, R. M. (1962). Power-dependence relations. *American Sociological Review, 27*(1), 31–41.

Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks, 1*(3), 215–239.

Halu, A., Zhao, K., Baronchelli, A., & Bianconi, G. (2013). Connect and win: The role of social networks in political elections. *EPL (Europhysics Letters), 102*(1), 16002.

Handayani, R. S. (2020). Re-voting in general election 2019 in Indonesia. *Perspektif, 9*(1), 9–18.

Hasibuan, S. A. (2023). Sistem pemilihan umum dalam kaitan dengan negara demokrasi. *Warta Dharmawangsa, 17*(2), 602–609.

Javarone, M. A. (2016). Network strategies in election campaigns. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2016*(4), 043402.

Khoiri, Muhammad Daffa. "Jaringan Politik Irman Gusman Di Muhammadiyah Dalam Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dpd Ri Tahun 2024 Di Sumatera Barat." Universitas Andalas, 2025.

Knoke, D. (1990). *Political networks: The structural perspective.* Cambridge University Press.

Knoke, David. *Political Networks The Structural Perspective*. Melbourne: Cambridge University Press, 1990.

Laily, Nisful. *Teori SoSial Empirik Untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020.

Lorrain, F., & White, H. C. (1971). Structural equivalence of individuals in social networks. *Journal of Mathematical Sociology, 1*(1), 49–80.

Lubis, Maulana Hariz. "Analisis Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2024." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.

Mahendra, Bagas Islam. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Provinsi Sumatera Barat Di Kota Bukittinggi Tahun 2024." Universitas Andalas, 2025.

Miriam, Budiardjo. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif.* PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2014.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 3. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Prayogi, M. A., Yandra, A., Nasution, S. R., Hadry, R., & Zulkifli, A. (2025). Verification Process for DPD Member Candidacy in Riau Province Through The SILON Application in 2024. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, *6*(2), 131-142.

Rohim, Ainur. "Pembelahan Dukungan Jaringan Politik Nu Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018." *Jurnal Politik Indonesia* 5, no. 01 (2019): 32–62.

Saldaña, Johnny, and Matt Omasta. *Analyzing Interviews: Preparing, Conducting, and Transcribing. Qualitative Research: Analyzing Life,*. Singapore: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd., 2018.

Setiawan, M. Osama Ergi, Devina Khozila Kirana, and Shello Priza. "Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil." *JOLASOS : Journal Of Law And Social Society*, 2024, 11–26.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.

Ningsih, S. A., & Yandra, A. (2024). Riau Provincial General Election Commission's Efforts to Increase Political Participation of Disabled Voters in The 2024 Election. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, *5*(2), 140-147.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications.* Cambridge University Press.

Yandra, A., Novianti, S., Irawati, I., Rianita, D., Effendi, I., & Hadi, T. (2026). Riau Province's land and forest governance: The tendency of budget information transparency among Riau's 12 regencies. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, *8*(5), 2979.

Yandra, A., Yasir, M. (2025). How Can the Foundations of Democracy be Weakened? Case Study of Inaccuracy and Independency of Election Data in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, *4*(1), 304-317.

Yin, R. K. (2011). *Studi kasus: Desain dan metode.* PT Raja Grafindo Persada.